



KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR: 737/K.1/HKM.02.2/2025

TENTANG

HASIL PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perumusan kebijakan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, telah dilaksanakan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pelaksanaan pengukuran sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diperoleh hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan tata kelola kebijakan, penguatan kapasitas organisasi, serta penyusunan rekomendasi perbaikan bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas kebijakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 184);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 8/K.1/HKM.02.2/2025 tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG HASIL PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Hasil Pengukuran Tahun IKK.

KEDUA : Daftar instansi pemerintah dan kualifikasi dalam Hasil Pengukuran IKK Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibagi berdasarkan kelompok instansi pemerintah yang terdiri atas:
a. Kementerian;
b. Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK);
c. Pemerintah Provinsi;
d. Pemerintah Kabupaten; dan
e. Pemerintah Kota.

KEEMPAT : Rincian penilaian Hasil Pengukuran IKK Tahun 2025 masing-masing instansi pemerintah, mengacu pada rincian hasil penilaian yang terdapat dalam sistem informasi pengukuran

kualitas kebijakan dalam laman *ikk.lan.go.id* yang dapat diakses oleh masing-masing instansi.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2025

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,



MUHAMMAD TAUFIQ

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR: 737/K.1/HKM.02.2/2025
TENTANG
HASIL PENGUKURAN INDEKS KUALITAS
KEBIJAKAN TAHUN 2025

DAFTAR INSTANSI PEMERINTAH DAN KUALIFIKASI DALAM HASIL
PENGUKURAN IKK TAHUN 2025

I. Kementerian

No	Instansi Pemerintah	Kualifikasi
1	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Cukup
2	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Sangat Baik
3	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Baik
4	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Unggul
5	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Sangat Baik
6	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Sangat Baik
7	Kementerian Dalam Negeri	Sangat Baik
8	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sangat Baik
9	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	Baik
10	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Baik
11	Kementerian Hak Asasi Manusia	Cukup
12	Kementerian Hukum	Unggul
13	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	Sangat Baik
14	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Baik
15	Kementerian Kebudayaan	Cukup
16	Kementerian Kehutanan	Unggul
17	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sangat Baik
18	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Sangat Baik
19	Kementerian Kesehatan	Unggul
20	Kementerian Ketenagakerjaan	Sangat Baik
21	Kementerian Keuangan	Unggul
22	Kementerian Komunikasi dan Digital	Sangat Baik
23	Kementerian Koperasi	Baik
24	Kementerian Luar Negeri	Baik
25	Kementerian Pariwisata	Sangat Baik
26	Kementerian Pekerjaan Umum	Sangat Baik
27	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sangat Baik
28	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Baik
29	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan	Unggul

No	Instansi Pemerintah	Kualifikasi
	Reformasi Birokrasi	
30	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Unggul
31	Kementerian Perdagangan	Sangat Baik
32	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Unggul
33	Kementerian Perhubungan	Sangat Baik
34	Kementerian Perindustrian	Baik
35	Kementerian Pertahanan	Baik
36	Kementerian Pertanian	Unggul
37	Kementerian Sekretariat Negara	Sangat Baik
38	Kementerian Sosial	Unggul
39	Kementerian Transmigrasi	Cukup
40	Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Sangat Baik

II. Lembaga

No	Instansi Pemerintah	Kualifikasi
41	Arsip Nasional Republik Indonesia	Sangat Baik
42	Badan Informasi Geospasial	Sangat Baik
43	Badan Keamanan Laut	Sangat Baik
44	Badan Kepegawaian Negara	Sangat Baik
45	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Sangat Baik
46	Badan Narkotika Nasional	Baik
47	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Baik
48	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Sangat Baik
49	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik
50	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Baik
51	Badan Pangan Nasional	Sangat Baik
52	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Baik
53	Badan Pemeriksa Keuangan	Baik
54	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Unggul
55	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Baik
56	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Sangat Baik
57	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Unggul
58	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Cukup
59	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Sabang	Cukup
60	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Baik
61	Badan Pusat Statistik	Sangat Baik
62	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Sangat Baik
63	Badan Siber dan Sandi Negara	Sangat Baik
64	Badan Standardisasi Nasional	Sangat Baik
65	Kejaksaan Agung	Sangat Baik
66	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Cukup
67	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Cukup
68	Komisi Pemberantasan Korupsi	Baik
69	Komisi Pemilihan Umum	Baik
70	Komisi Yudisial	Baik
71	Lembaga Administrasi Negara	Unggul
72	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Sangat Baik
73	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia	Cukup
74	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Sangat Baik
75	Mahkamah Konstitusi	Baik
76	Ombudsman Republik Indonesia	Sangat Baik
77	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Sangat Baik
78	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Baik
79	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah	Cukup
80	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat	Sangat Baik
81	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat	Cukup
82	Televisi Republik Indonesia	Cukup

III. Pemerintah Provinsi

No	Instansi Pemerintah	Kualifikasi
83	Pemerintah Provinsi Aceh	Cukup
84	Pemerintah Provinsi Bali	Baik
85	Pemerintah Provinsi Banten	Sangat Baik
86	Pemerintah Provinsi Bengkulu	Kurang
87	Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Sangat Baik
88	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Unggul
89	Pemerintah Provinsi Gorontalo	Cukup
90	Pemerintah Provinsi Jambi	Cukup
91	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Sangat Baik
92	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Cukup
93	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Unggul
94	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Cukup
95	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Kurang
96	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Unggul
97	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	Cukup
98	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Cukup
99	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Baik
100	Pemerintah Provinsi Lampung	Cukup
101	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kurang
102	Pemerintah Provinsi Riau	Baik
103	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Kurang
104	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Baik
105	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Sangat Baik
106	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	Kurang
107	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	Kurang
108	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Cukup
109	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Cukup
110	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Baik

IV. Pemerintah Kabupaten

No	Instansi Pemerintah	Kualifikasi
111	Pemerintah Kabupaten Aceh Barat	Kurang
112	Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya	Cukup
113	Pemerintah Kabupaten Aceh Besar	Kurang
114	Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya	Baik
115	Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	Kurang
116	Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang	Cukup
117	Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah	Kurang
118	Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara	Kurang
119	Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	Kurang
120	Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	Kurang
121	Pemerintah Kabupaten Agam	Baik
122	Pemerintah Kabupaten Asahan	Sangat Baik
123	Pemerintah Kabupaten Badung	Baik
124	Pemerintah Kabupaten Balangan	Sangat Baik
125	Pemerintah Kabupaten Bandung	Sangat Baik
126	Pemerintah Kabupaten Bandung Barat	Sangat Baik
127	Pemerintah Kabupaten Banggai	Sangat Baik
128	Pemerintah Kabupaten Banggai Laut	Baik
129	Pemerintah Kabupaten Bangka	Baik
130	Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	Cukup
131	Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan	Kurang
132	Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	Baik
133	Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Kurang
134	Pemerintah Kabupaten Bangli	Baik
135	Pemerintah Kabupaten Banjar	Cukup
136	Pemerintah Kabupaten Banjarnegara	Sangat Baik
137	Pemerintah Kabupaten Bantaeng	Baik
138	Pemerintah Kabupaten Bantul	Sangat Baik
139	Pemerintah Kabupaten Banyuasin	Sangat Baik
140	Pemerintah Kabupaten Banyumas	Baik
141	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Kurang
142	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Kurang
143	Pemerintah Kabupaten Barito Timur	Kurang
144	Pemerintah Kabupaten Barito Utara	Baik
145	Pemerintah Kabupaten Barru	Baik
146	Pemerintah Kabupaten Batang	Sangat Baik
147	Pemerintah Kabupaten Bekasi	Baik
148	Pemerintah Kabupaten Belitung	Sangat Baik
149	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Sangat Baik
150	Pemerintah Kabupaten Belu	Kurang
151	Pemerintah Kabupaten Bener Meriah	Kurang
152	Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Cukup
153	Pemerintah Kabupaten Bengkayang	Kurang
154	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan	Cukup
155	Pemerintah Kabupaten Berau	Kurang
156	Pemerintah Kabupaten Bintan	Baik
157	Pemerintah Kabupaten Bireuen	Cukup
158	Pemerintah Kabupaten Blitar	Baik
159	Pemerintah Kabupaten Blora	Sangat Baik

No	Instansi Pemerintah	Kualifikasi
160	Pemerintah Kabupaten Boalemo	Kurang
161	Pemerintah Kabupaten Bogor	Sangat Baik
162	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Kurang
163	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow	Cukup
164	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Cukup
165	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Kurang
166	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Cukup
167	Pemerintah Kabupaten Bombana	Cukup
168	Pemerintah Kabupaten Bondowoso	Baik
169	Pemerintah Kabupaten Bone	Kurang
170	Pemerintah Kabupaten Bone Bolango	Kurang
171	Pemerintah Kabupaten Boyolali	Sangat Baik
172	Pemerintah Kabupaten Brebes	Baik
173	Pemerintah Kabupaten Buleleng	Baik
174	Pemerintah Kabupaten Bulukumba	Kurang
175	Pemerintah Kabupaten Buton	Sangat Baik
176	Pemerintah Kabupaten Buton Tengah	Kurang
177	Pemerintah Kabupaten Ciamis	Unggul
178	Pemerintah Kabupaten Cianjur	Baik
179	Pemerintah Kabupaten Cilacap	Baik
180	Pemerintah Kabupaten Cirebon	Baik
181	Pemerintah Kabupaten Dairi	Baik
182	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Baik
183	Pemerintah Kabupaten Demak	Unggul
184	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	Baik
185	Pemerintah Kabupaten Dompu	Kurang
186	Pemerintah Kabupaten Donggala	Cukup
187	Pemerintah Kabupaten Empat Lawang	Kurang
188	Pemerintah Kabupaten Ende	Kurang
189	Pemerintah Kabupaten Flores Timur	Cukup
190	Pemerintah Kabupaten Garut	Sangat Baik
191	Pemerintah Kabupaten Gayo Lues	Sangat Baik
192	Pemerintah Kabupaten Gianyar	Baik
193	Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara	Kurang
194	Pemerintah Kabupaten Gowa	Baik
195	Pemerintah Kabupaten Gresik	Sangat Baik
196	Pemerintah Kabupaten Grobogan	Baik
197	Pemerintah Kabupaten Gunung Mas	Baik
198	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	Sangat Baik
199	Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah	Cukup
200	Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur	Cukup
201	Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara	Cukup
202	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Unggul
203	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Cukup
204	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	Baik
205	Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	Cukup
206	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	Kurang
207	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu	Kurang
208	Pemerintah Kabupaten Indramayu	Baik
209	Pemerintah Kabupaten Jember	Baik

No	Instansi Pemerintah	Kualifikasi
210	Pemerintah Kabupaten Jembrana	Cukup
211	Pemerintah Kabupaten Jenepono	Cukup
212	Pemerintah Kabupaten Jepara	Kurang
213	Pemerintah Kabupaten Jombang	Cukup
214	Pemerintah Kabupaten Kampar	Sangat Baik
215	Pemerintah Kabupaten Kapuas	Cukup
216	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	Sangat Baik
217	Pemerintah Kabupaten Karangasem	Sangat Baik
218	Pemerintah Kabupaten Karawang	Sangat Baik
219	Pemerintah Kabupaten Karimun	Sangat Baik
220	Pemerintah Kabupaten Karo	Baik
221	Pemerintah Kabupaten Katingan	Cukup
222	Pemerintah Kabupaten Kaur	Kurang
223	Pemerintah Kabupaten Kebumen	Sangat Baik
224	Pemerintah Kabupaten Kediri	Kurang
225	Pemerintah Kabupaten Kendal	Baik
226	Pemerintah Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro	Cukup
227	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas	Kurang
228	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru	Kurang
229	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Cukup
230	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	Kurang
231	Pemerintah Kabupaten Ketapang	Baik
232	Pemerintah Kabupaten Klaten	Sangat Baik
233	Pemerintah Kabupaten Klungkung	Baik
234	Pemerintah Kabupaten Kolaka	Kurang
235	Pemerintah Kabupaten Konawe	Kurang
236	Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan	Cukup
237	Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan	Kurang
238	Pemerintah Kabupaten Kotabaru	Cukup
239	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	Kurang
240	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur	Cukup
241	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Baik
242	Pemerintah Kabupaten Kudus	Cukup
243	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	Sangat Baik
244	Pemerintah Kabupaten Kuningan	Baik
245	Pemerintah Kabupaten Kupang	Kurang
246	Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	Cukup
247	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	Baik
248	Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	Sangat Baik
249	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu	Kurang
250	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Kurang
251	Pemerintah Kabupaten Lamandau	Kurang
252	Pemerintah Kabupaten Lamongan	Unggul
253	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Baik
254	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	Kurang
255	Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	Cukup
256	Pemerintah Kabupaten Lampung Utara	Cukup
257	Pemerintah Kabupaten Langkat	Kurang
258	Pemerintah Kabupaten Lebak	Cukup
259	Pemerintah Kabupaten Lebong	Kurang

No	Instansi Pemerintah	Kualifikasi
260	Pemerintah Kabupaten Lingga	Kurang
261	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	Baik
262	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	Baik
263	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	Cukup
264	Pemerintah Kabupaten Lumajang	Baik
265	Pemerintah Kabupaten Luwu	Kurang
266	Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	Kurang
267	Pemerintah Kabupaten Madiun	Baik
268	Pemerintah Kabupaten Magelang	Baik
269	Pemerintah Kabupaten Magetan	Baik
270	Pemerintah Kabupaten Majalengka	Baik
271	Pemerintah Kabupaten Majene	Kurang
272	Pemerintah Kabupaten Malang	Kurang
273	Pemerintah Kabupaten Malinau	Baik
274	Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah	Kurang
275	Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah	Kurang
276	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat	Kurang
277	Pemerintah Kabupaten Maros	Unggul
278	Pemerintah Kabupaten Melawi	Cukup
279	Pemerintah Kabupaten Mesuji	Baik
280	Pemerintah Kabupaten Minahasa	Kurang
281	Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan	Baik
282	Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Baik
283	Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	Baik
284	Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Baik
285	Pemerintah Kabupaten Muna	Kurang
286	Pemerintah Kabupaten Muna Barat	Kurang
287	Pemerintah Kabupaten Murung Raya	Baik
288	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	Cukup
289	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	Kurang
290	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara	Kurang
291	Pemerintah Kabupaten Nagan raya	Cukup
292	Pemerintah Kabupaten Nagekeo	Kurang
293	Pemerintah Kabupaten Natuna	Cukup
294	Pemerintah Kabupaten Nganjuk	Sangat Baik
295	Pemerintah Kabupaten Ngawi	Baik
296	Pemerintah Kabupaten Nias Utara	Kurang
297	Pemerintah Kabupaten Nunukan	Kurang
298	Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir	Cukup
299	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir	Sangat Baik
300	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu	Cukup
301	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Baik
302	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Kurang
303	Pemerintah Kabupaten Pacitan	Baik
304	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	Cukup
305	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	Kurang
306	Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	Sangat Baik
307	Pemerintah Kabupaten Pamekasan	Kurang
308	Pemerintah Kabupaten Pandeglang	Kurang
309	Pemerintah Kabupaten Pangandaran	Sangat Baik

No	Instansi Pemerintah	Kualifikasi
310	Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kurang
311	Pemerintah Kabupaten Pasaman	Kurang
312	Pemerintah Kabupaten Paser	Unggul
313	Pemerintah Kabupaten Pasuruan	Baik
314	Pemerintah Kabupaten Pati	Cukup
315	Pemerintah Kabupaten Pekalongan	Cukup
316	Pemerintah Kabupaten Pematang	Baik
317	Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	Sangat Baik
318	Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Kurang
319	Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat	Cukup
320	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Baik
321	Pemerintah Kabupaten Pidie	Cukup
322	Pemerintah Kabupaten Pidie jaya	Sangat Baik
323	Pemerintah Kabupaten Pohuwato	Cukup
324	Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	Baik
325	Pemerintah Kabupaten Ponorogo	Kurang
326	Pemerintah Kabupaten Poso	Cukup
327	Pemerintah Kabupaten Probolinggo	Baik
328	Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu	Kurang
329	Pemerintah Kabupaten Purbalingga	Kurang
330	Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Unggul
331	Pemerintah Kabupaten Purworejo	Cukup
332	Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong	Kurang
333	Pemerintah Kabupaten Rembang	Baik
334	Pemerintah Kabupaten Rokan hulu	Kurang
335	Pemerintah Kabupaten Rote Ndao	Kurang
336	Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua	Cukup
337	Pemerintah Kabupaten Sambas	Cukup
338	Pemerintah Kabupaten Samosir	Cukup
339	Pemerintah Kabupaten Sampang	Cukup
340	Pemerintah Kabupaten Sanggau	Baik
341	Pemerintah Kabupaten Sarolangun	Cukup
342	Pemerintah Kabupaten Sekadau	Cukup
343	Pemerintah Kabupaten Seluma	Kurang
344	Pemerintah Kabupaten Semarang	Baik
345	Pemerintah Kabupaten Serang	Cukup
346	Pemerintah Kabupaten Seruyan	Sangat Baik
347	Pemerintah Kabupaten Siak	Cukup
348	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	Cukup
349	Pemerintah Kabupaten Sigi	Sangat Baik
350	Pemerintah Kabupaten Sijunjung	Kurang
351	Pemerintah Kabupaten Sikka	Cukup
352	Pemerintah Kabupaten Simalungun	Cukup
353	Pemerintah Kabupaten Simeulue	Kurang
354	Pemerintah Kabupaten Sinjai	Kurang
355	Pemerintah Kabupaten Sintang	Kurang
356	Pemerintah Kabupaten Situbondo	Baik
357	Pemerintah Kabupaten Sleman	Baik
358	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	Baik
359	Pemerintah Kabupaten Soppeng	Cukup

No	Instansi Pemerintah	Kualifikasi
360	Pemerintah Kabupaten Sragen	Baik
361	Pemerintah Kabupaten Subang	Sangat Baik
362	Pemerintah Kabupaten Sukabumi	Unggul
363	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Baik
364	Pemerintah Kabupaten Sumbawa	Cukup
365	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	Cukup
366	Pemerintah Kabupaten Sumedang	Baik
367	Pemerintah Kabupaten Tabalong	Baik
368	Pemerintah Kabupaten Tabanan	Kurang
369	Pemerintah Kabupaten Tana Tidung	Sangat Baik
370	Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	Kurang
371	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Kurang
372	Pemerintah Kabupaten Tanah Datar	Kurang
373	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Baik
374	Pemerintah Kabupaten Tangerang	Kurang
375	Pemerintah Kabupaten Tanggamus	Kurang
376	Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Cukup
377	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	Kurang
378	Pemerintah Kabupaten Tapin	Sangat Baik
379	Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	Sangat Baik
380	Pemerintah Kabupaten Tebo	Kurang
381	Pemerintah Kabupaten Tegal	Baik
382	Pemerintah Kabupaten Temanggung	Baik
383	Pemerintah Kabupaten Toba	Sangat Baik
384	Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una	Sangat Baik
385	Pemerintah Kabupaten Toli Toli	Kurang
386	Pemerintah Kabupaten Toraja Utara	Kurang
387	Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Baik
388	Pemerintah Kabupaten Tuban	Baik
389	Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat	Cukup
390	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Sangat Baik
391	Pemerintah Kabupaten Wajo	Cukup
392	Pemerintah Kabupaten Wakatobi	Cukup
393	Pemerintah Kabupaten Wonogiri	Baik
394	Pemerintah Kabupaten Wonosobo	Sangat Baik

V. Pemerintah Kota

No	Instansi Pemerintah	Kualifikasi
395	Pemerintah Kota Balikpapan	Sangat Baik
396	Pemerintah Kota Banda Aceh	Kurang
397	Pemerintah Kota Bandung	Sangat Baik
398	Pemerintah Kota Banjar	Sangat Baik
399	Pemerintah Kota Banjarbaru	Kurang
400	Pemerintah Kota Banjarmasin	Baik
401	Pemerintah Kota Batam	Kurang
402	Pemerintah Kota Batu	Sangat Baik
403	Pemerintah Kota Bekasi	Baik
404	Pemerintah Kota Bengkulu	Cukup
405	Pemerintah Kota Bima	Cukup
406	Pemerintah Kota Binjai	Cukup
407	Pemerintah Kota Bitung	Cukup
408	Pemerintah Kota Blitar	Sangat Baik
409	Pemerintah Kota Bogor	Sangat Baik
410	Pemerintah Kota Bontang	Unggul
411	Pemerintah Kota Bukittinggi	Kurang
412	Pemerintah Kota Cilegon	Sangat Baik
413	Pemerintah Kota Cimahi	Sangat Baik
414	Pemerintah Kota Cirebon	Unggul
415	Pemerintah Kota Denpasar	Unggul
416	Pemerintah Kota Depok	Sangat Baik
417	Pemerintah Kota Gorontalo	Kurang
418	Pemerintah Kota Jambi	Kurang
419	Pemerintah Kota Kediri	Cukup
420	Pemerintah Kota Kotamobagu	Kurang
421	Pemerintah Kota Langsa	Baik
422	Pemerintah Kota Lhokseumawe	Cukup
423	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	Baik
424	Pemerintah Kota Madiun	Sangat Baik
425	Pemerintah Kota Magelang	Sangat Baik
426	Pemerintah Kota Makassar	Kurang
427	Pemerintah Kota Malang	Unggul
428	Pemerintah Kota Manado	Baik
429	Pemerintah Kota Mataram	Baik
430	Pemerintah Kota Medan	Baik
431	Pemerintah Kota Mojokerto	Baik
432	Pemerintah Kota Padang	Unggul
433	Pemerintah Kota Padang Panjang	Sangat Baik
434	Pemerintah Kota Palangkaraya	Kurang
435	Pemerintah Kota Palembang	Sangat Baik
436	Pemerintah Kota Palu	Baik
437	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	Cukup
438	Pemerintah Kota Parepare	Cukup
439	Pemerintah Kota Pariaman	Sangat Baik
440	Pemerintah Kota Pasuruan	Sangat Baik
441	Pemerintah Kota Payakumbuh	Sangat Baik
442	Pemerintah Kota Pekalongan	Baik

No	Instansi Pemerintah	Kualifikasi
443	Pemerintah Kota Pekanbaru	Baik
444	Pemerintah Kota Pematangsiantar	Cukup
445	Pemerintah Kota Pontianak	Kurang
446	Pemerintah Kota Prabumulih	Kurang
447	Pemerintah Kota Probolinggo	Sangat Baik
448	Pemerintah Kota Salatiga	Kurang
449	Pemerintah Kota Samarinda	Sangat Baik
450	Pemerintah Kota Sawahlunto	Baik
451	Pemerintah Kota Semarang	Cukup
452	Pemerintah Kota Serang	Cukup
453	Pemerintah Kota Sibolga	Cukup
454	Pemerintah Kota Singkawang	Baik
455	Pemerintah Kota Subulussalam	Kurang
456	Pemerintah Kota Sukabumi	Baik
457	Pemerintah Kota Sungai Penuh	Kurang
458	Pemerintah Kota Surabaya	Unggul
459	Pemerintah Kota Surakarta	Sangat Baik
460	Pemerintah Kota Tangerang	Baik
461	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Sangat Baik
462	Pemerintah Kota Tanjung Balai	Kurang
463	Pemerintah Kota Tanjung Pinang	Kurang
464	Pemerintah Kota Tarakan	Baik
465	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Sangat Baik
466	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	Kurang
467	Pemerintah Kota Tegal	Cukup
468	Pemerintah Kota Yogyakarta	Sangat Baik

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,



MUHAMMAD TAUFIQ